

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan BUMDes melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Praktik Penatausahaan

Asih Handayani¹ Zulfa Rosharlianti² Tsarina Zenabia³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: dosen02434@unpam.ac.id¹ dosen00876@unpam.ac.id² dosen02502@unpam.ac.id³

Abstrak

BUMDes termasuk entitas yang rentan terhadap penyalahgunaan keuangan. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat 77 kasus korupsi desa tahun 2024, yang mengindikasikan adanya kelemahan akuntabilitas keuangan pada entitas desa. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris bagaimana akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan penatausahaan di BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 434 pengelola BUMDes di Provinsi Banten yang dipilih menggunakan Teknik convenience sampling. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes. Temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi sekedar pilihan melainkan keharusan bagi entitas dalam memitigasi risiko kecurangan. Lebih lanjut, struktur penatausahaan yang sistematis menciptakan struktur dan prosedur formal yang memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Kedepannya BUMDes disarankan untuk mulai mengintegrasikan prosedur penatausahaan baku dengan sistem informasi yang memadai guna menjaga kepercayaan public.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan, Bumdes, Financial Accountability, Fraud



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar utama kemandirian ekonomi desa sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat (Puspitasari & Adi, 2023). Namun, ekspektasi terhadap tata kelola BUMDes yang bersih dihadapkan pada realitas tingginya tingkat kecurangan finansial. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat 77 kasus korupsi dana desa pada tahun 2024 (Albari, 2025), sebuah anomali yang menegaskan rentannya BUMDes terhadap penyalahgunaan keuangan. Fenomena serupa mengindikasikan rendahnya literasi keuangan dan kelemahan sistem pengendalian internal. Studi pendahuluan pada BUMDes Bebedahan Berkah di Banten mengonfirmasi hal ini; meskipun entitas telah mengadopsi aplikasi digital untuk pencatatan keuangan, potensi kecurangan seperti *lapping*, ketidaktepatan alokasi, dan inakurasi penyajian laporan keuangan masih marak terjadi (Haeruddin & Mariana, 2021; Handayani et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah berupaya mengurai determinan akuntabilitas keuangan BUMDes, namun memberikan hasil yang terfragmentasi. Indriyanthi, dkk. (2021) menyoroti bahwa tata kelola dan akuntabilitas BUMDes secara umum belum berjalan maksimal akibat rendahnya kompetensi manajerial. Dari sisi kepatuhan pelaporan, Mayasari, dkk. (2023) menemukan bahwa laporan keuangan BUMDes mayoritas telah menyadur SAK ETAP, namun kehilangan esensi transparansi karena ketiadaan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang memadai. Sementara itu, Masjidin, dkk. (2021) membuktikan bahwa pelaksanaan penatausahaan dan adopsi teknologi informasi merupakan instrumen krusial dalam mendorong pertanggungjawaban keuangan, di mana sistem yang terstruktur mampu mereduksi asimetri informasi antara pengelola dan pemangku kepentingan.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji peran teknologi dan penatausahaan terhadap akuntabilitas, mayoritas penelitian terdahulu terjebak pada asumsi bahwa "ketersediaan teknologi otomatis menjamin akuntabilitas", dan umumnya terbatas pada observasi studi kasus tunggal. Terdapat kesenjangan empiris (*empirical gap*) yang belum banyak dieksplorasi: mengapa implementasi teknologi informasi di entitas desa seringkali gagal memitigasi risiko manipulasi data seperti lapping? Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan model evaluasi yang lebih komprehensif pada level provinsi. Signifikansi penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa teknologi informasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tata kelola penatausahaan yang terstandarisasi guna menutup celah kecurangan, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan penatausahaan terhadap tingkat akuntabilitas keuangan BUMDes di Provinsi Banten.

Landasan Teori

Penelitian ini dilandasi oleh integrasi *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*, yang dijembatani oleh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks sektor publik. Menurut Jensen & Meckling (1976), *Agency Theory* mengasumsikan adanya asimetri informasi antara principal (masyarakat dan pemerintah desa) dan agent (pengelola BUMDes). Pengelola cenderung memiliki informasi yang lebih luas terkait kondisi keuangan dibandingkan masyarakat, yang dapat memicu konflik kepentingan dan potensi kecurangan (*fraud*). Untuk memitigasi hal ini, diperlukan akuntabilitas yang tinggi melalui mekanisme pelaporan keuangan yang transparan (Chen et al., 2025). Sebagai penyeimbang, *Stewardship Theory* memandang pengelola BUMDes bukan sekadar agen yang termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan pelayan (*steward*) yang dapat dipercaya untuk memprioritaskan kesejahteraan desa (Afriansyah et al., 2022). Untuk mengoptimalkan peran *stewardship* sekaligus menekan risiko keagenan, BUMDes wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). GCG dalam pengelolaan entitas desa menekankan pada nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Kayani et al., 2025). Penerapan GCG memastikan bahwa setiap keputusan finansial dilakukan secara etis, didukung oleh penatausahaan yang sistematis, dan diakselerasi melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menjamin keandalan laporan keuangan (Sofyani et al., 2022).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	(Afriansyah et al., 2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong)	Menguji secara empiris kualitas pelaporan keuangan, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Kuantitatif Deskriptif	Kualitas laporan keuangan, kompetensi dan sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	<u>Relevansi:</u> Mendukung argumentasi bahwa tata kelola internal esensial bagi akuntabilitas. <u>Kesenjangan (Gap):</u> Riset ini terbatas pada pemerintah desa secara umum dan belum mengukur peran spesifik teknologi informasi dalam operasional BUMDes, yang

						menjadi fokus utama pada riset ini.
2	(Akbar et al., 2022)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur	Mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi BUMDes Bina Sejahtera ke pihak pemerintah desa dan masyarakat.	Kualitatif Deskriptif	Laporan keuangan BUMDes Bina Sejahtera telah terintegrasi dan memadai (menyajikan neraca dan laba/rugi). Dokumen pertanggungjawaban tersedia dan didukung oleh penyebaran informasi melalui media sosial serta forum desa, namun belum dilengkapi dengan panduan akses informasi yang terstruktur bagi masyarakat.	<u>Relevansi:</u> Penelitian ini memberikan landasan konseptual bahwa integrasi pencatatan keuangan dan ketersediaan akses informasi (seperti penggunaan media sosial) merupakan elemen esensial dalam membangun transparansi BUMDes terhadap publik. <u>Kesenjangan (Gap):</u> Kajian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus studi kasus tunggal, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasi. Selain itu, peran teknologi informasi baru sebatas sarana penyaluran informasi, belum diuji efektivitasnya secara sistematis.
3	(Puspitasari & Adi, 2023)	Akuntabilitas Keuangan BUMDes: Sebuah Perpektif Peran Pemerintah	Mengeksplorasi peran pemerintah sebagai regulator untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.	Kualitatif pendekatan Studi Kasus	Implementasi siklus pengelolaan keuangan di BUMDes Bangun Jaya belum berjalan secara akuntabel. Lemahnya akuntabilitas ini dipicu oleh praktik rangkap jabatan dan ketiadaan regulasi serta standar operasional spesifik BUMDes. Akibatnya, proses penatausahaan hanya mengandalkan pemahaman pribadi pengelola, yang berujung pada penyajian laporan keuangan yang tidak andal.	<u>Relevansi:</u> Temuan ini memperkuat justifikasi teoritis penelitian bahwa ketiadaan standar tata kelola dan lemahnya prosedur penatausahaan secara langsung merusak kualitas pelaporan keuangan BUMDes. <u>Kesenjangan (Gap):</u> Penelitian terdahulu ini sebatas mengidentifikasi akar masalah (ketiadaan regulasi dan rangkap jabatan) secara kualitatif.
4	(Mayasari et al., 2023)	Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDes Subur	Mengetahui akuntabilitas vertikal dan horizontal laporan keuangan BUMDes.	Kualitatif pendekatan Studi Kasus	Penyajian laporan keuangan BUMDes belum sepenuhnya akuntabel dan belum memenuhi pedoman SAK EMKM secara	<u>Relevansi:</u> Temuan ini memberikan landasan empiris bagi riset ini bahwa kepatuhan terhadap regulasi formal tidak

		Makmur Lestari Desa Wisata Tlogoweru			utuh akibat ketiadaan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Meskipun secara regulasi telah mematuhi PP No. 11 Tahun 2021, integritas data keuangan belum maksimal dan pengungkapan informasi (transparansi) kepada masyarakat masih sangat minim.	serta-merta menjamin kualitas pelaporan keuangan jika tidak didukung oleh sistem teknis yang memadai. <u>Kesenjangan (Gap):</u> Penelitian rujukan ini sekadar mendiagnosis gejala ketidaklengkapan laporan secara kualitatif pada satu studi kasus.
5	(Masjidin & Yuliani, 2021)	Determinasi Pertanggung jawaban Keuangan BUMDes	Menguji secara empiris pengaruh perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.	Kuantitatif berupa Survei	Pelaksanaan penatausahaan dan penggunaan teknologi informasi terbukti berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan, sedangkan tahapan perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.	<u>Relevansi:</u> Temuan ini bertindak sebagai fondasi empiris utama (grand theory) bagi hipotesis riset ini. <u>Kesenjangan (Gap):</u> Lingkup terbatas di tingkat Kabupaten, pada riset ini ruang lingkup diperluas ke tingkat Provinsi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Di era digital, ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan elemen krusial dalam menekan potensi manipulasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan perangkat lunak akuntansi khusus BUMDes, meminimalkan intervensi manual yang rentan terhadap human error maupun kesengajaan penggelapan aset (*fraud*) (Suryani & Gaol, 2025). Dari perspektif *Stewardship Theory*, teknologi bertindak sebagai alat (instrumen) yang memberdayakan pengelola untuk menyajikan laporan kinerja secara efisien dan komprehensif kepada masyarakat. Terintegrasinya sistem pencatatan dengan standar pelaporan terbukti secara empiris mampu meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik (Hamza et al., 2023; Ishak & Syam, 2020). H1: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes.

Pengaruh Pelaksanaan Penatausahaan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan prinsip Good Corporate Governance, akuntabilitas hanya dapat dicapai jika organisasi memiliki struktur pengendalian internal yang jelas. Implementasi dan administrasi (penatausahaan) yang baik mencakup kepatuhan terhadap prosedur operasional baku (SOP), dokumentasi bukti transaksi yang valid, dan evaluasi program secara berkala. Penatausahaan yang tertib menutup celah asimetri informasi yang dijelaskan dalam *Agency Theory*, karena seluruh aktivitas ekonomi tercatat dan dapat ditelusuri (*traceable*). Penelitian Masjidin & Yuliani (2021) membuktikan secara empiris bahwa kedisiplinan dalam pelaksanaan dan penatausahaan memfasilitasi terciptanya pertanggungjawaban keuangan yang andal dan transparan kepada publik. H2: Pelaksanaan Penatausahaan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa survei untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan penatausahaan terhadap akuntabilitas keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola BUMDes di Provinsi Banten. Teknik penarikan sampel menggunakan *convenience sampling*, dengan total sampel akhir yang diolah sebanyak 434 responden dari 113 BUMDes. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dataset survei berskala makro yang sama dengan penelitian sebelumnya (Handayani et al., 2025). Namun demikian, penelitian ini mengajukan kebaruan (*novelty*) melalui pengembangan spesifikasi model empiris penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan penatausahaan menggunakan metode regresi linear berganda. Isolasi pada dua variabel ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih presisi bagaimana instrumen teknis memitigasi anomali pencatatan keuangan. Pengukuran instrumen kuesioner menggunakan skala *Likert* 5 poin, mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) hingga Sangat Setuju (5). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini mengadaptasi indikator dari penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasional Variabel

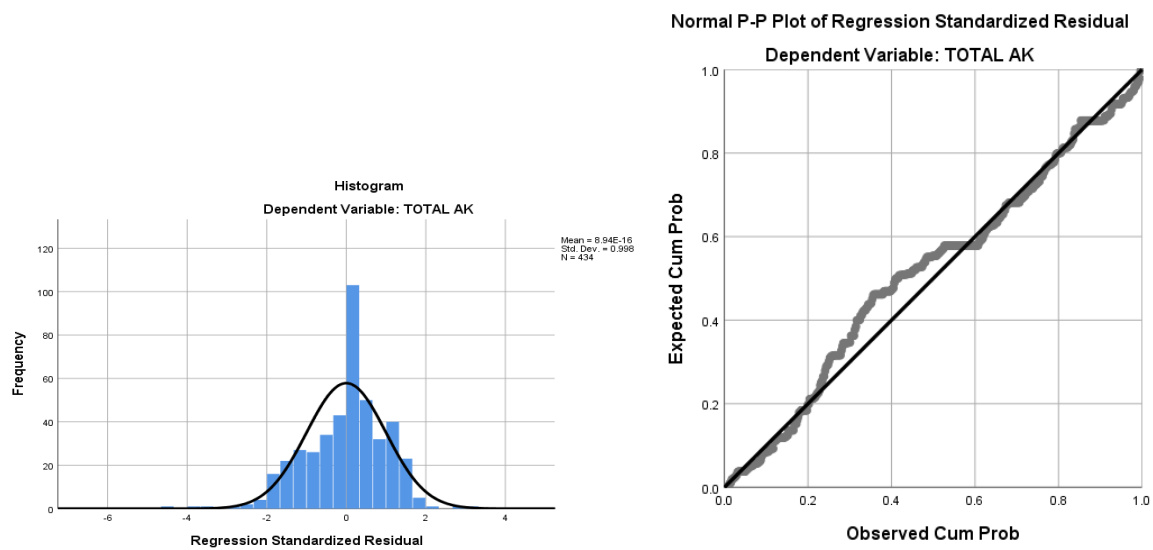
Variabel	Indikator Utama	Referensi
Akuntabilitas Keuangan (Y)	Publikasi rutin, kemudahan akses masyarakat, kesesuaian target dan realisasi, pelaporan rutin ke pemda, pelibatan masyarakat dalam keputusan, dan kejelasan alasan strategis keuangan. (8 item)	(Sofyani et al., 2022)
Penggunaan Teknologi Informasi (X1)	Ketersediaan perangkat keras, sistem komputerisasi dari hulu ke hilir, penggunaan software khusus BUMDes, integrasi sistem pelaporan, dan kesesuaian sistem dengan SAK. (5 item)	(Ishak & Syam, 2020)
Pelaksanaan Penatausahaan (X2)	Kesesuaian prosedur operasional, dokumentasi prosedur unit usaha, evaluasi rutin kesesuaian program, ketertiban pencatatan, dan kelengkapan bukti transaksi. (6 item)	(Masjidin & Yuliani, 2021)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Sebelum dilakukan uji hipotesis, instrumen penelitian dievaluasi kelayakannya melalui uji validitas (korelasi *Pearson Product-Moment*) dan uji reliabilitas (nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70). Selanjutnya, kelayakan model diuji menggunakan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), uji multikolinearitas (memastikan *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10), serta uji heteroskedastisitas (analisis pola *Scatterplot*). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda (*Ordinary Least Square*) dengan spesifikasi model persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$. Pengambilan keputusan hipotesis dievaluasi berdasarkan signifikansi koefisien secara parsial (Uji t) dan simultan (Uji F) pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), serta menginterpretasikan nilai Adjusted R^2 untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

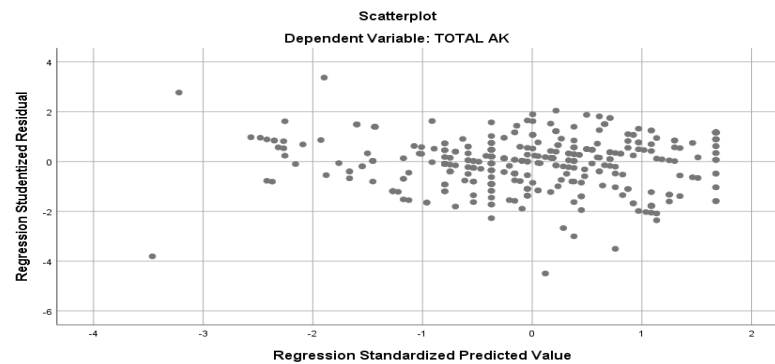
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, seluruh item kuesioner dievaluasi kelayakannya. Hasil uji validitas dengan *Pearson Product Moment* menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X1), Pelaksanaan Penatausahaan (X2) dan Akuntabilitas Keuangan (Y) memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,094), sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas mengonfirmasi keandalan instrumen dengan nilai *Cronbach's Alpha* untuk X1 (0,878), X2 (0,886), dan Y (0,848) yang seluruhnya berada di atas ambang batas 0,70.



Gambar 1. Grafik Histogram dan Normal P-P Plot



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Pengujian asumsi klasik dilakukan guna memastikan model regresi linear berganda (OLS) terbebas dari bias. Berdasarkan analisis grafik histogram dan normal P-P Plot, residual berdistribusi mendekati normal (Gambar 1). Walaupun terdapat sedikit skewness, asumsi normalitas secara umum terpenuhi merujuk pada *Central Limit Theorem* mengingat ukuran sampel yang besar ($N=434$) (Gunnvald, 2014). Uji multikolonieritas menunjukkan tidak adanya korelasi ekstrem antarvariabel independen, dibuktikan dengan nilai Tolerance $> 0,10$ dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 (Tabel 2). Selain itu, Scatterplot residual menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak tanpa pola tertentu, mengonfirmasi tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas (Gambar 2).

Tabel 2. Multikolonieritas

Variabel	VIF
X1	1,469
X2	1,469

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda untuk melihat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Ringkasan hasil pengujian statistik disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien	t-hitung	Signifikansi
Penggunaan Teknologi Informasi (X1)	0,465	6,742	0,000
Pelaksanaan Penatausahaan (X2)	0,359	4,872	0,000

Pengujian kelayakan model (Uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti model regresi layak digunakan untuk memprediksi Akuntabilitas Keuangan. Pada pengujian hipotesis secara parsial (Uji t), variabel Penggunaan Teknologi Informasi memiliki arah koefisien positif sebesar 0,465 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini mengonfirmasi bahwa Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, sehingga Hipotesis 1 diterima. Selanjutnya, Pelaksanaan Penatausahaan menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,359 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, sehingga Hipotesis 2 diterima. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,263 mengindikasikan bahwa variasi Akuntabilitas Keuangan BUMDes dapat dijelaskan oleh variabel Penggunaan Teknologi Informasi dan Pelaksanaan Penatausahaan sebesar 26,3%, sedangkan sisanya (73,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil pengujian kelayakan model (Uji F) membuktikan bahwa implementasi administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan menjadi prediktor yang valid dalam membentuk akuntabilitas keuangan BUMDes. Temuan ini menegaskan bahwa untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih, ketersediaan perangkat teknologi harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan prosedur administratif (Ishak & Syam, 2020; Mulyani & Kasim, 2017).

Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Analisis data menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Temuan ini membuktikan bahwa integrasi sistem komputerisasi bukan lagi sekadar pilihan operasional, melainkan sebuah keharusan strategis (*enabler critical*) untuk mentransformasi praktik akuntabilitas konvensional menjadi lebih transparan, cepat, dan andal di era digital. Pemrosesan data melalui sistem informasi yang memadai akan menghasilkan kualitas informasi (fakta dan nilai) yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks mitigasi risiko, keberadaan sistem yang baik memberikan kepuasan bagi pengguna sekaligus bertindak sebagai instrumen pengendalian internal yang ampuh untuk menekan celah kecurangan atau *fraud* yang bermotif keuntungan pribadi. Teknologi meminimalkan intervensi manual yang rentan terhadap rekayasa angka. Temuan ini secara konsisten mendukung hasil penelitian terdahulu dari Ishak & Syam (2020) serta Amelia & Yanti (2025), yang menyimpulkan bahwa pengadopsian teknologi informasi akuntansi berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa *output* informasi akuntansi yang terdigitalisasi secara langsung memperkuat tingkat pertanggungjawaban entitas bisnis desa di mata publik.

Pengaruh Pelaksanaan Penatausahaan terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa pelaksanaan penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan BUMDes. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem administrasi yang tertata dan prosedural mampu membentuk struktur

pengawasan formal yang mengikat perilaku pengelola organisasi pada standar transparansi yang diharapkan. Dari perspektif *Stewardship Theory*, penatausahaan yang sistematis memberikan kerangka kerja teknis yang memungkinkan pengelola (*stewards*) untuk mendemonstrasikan akuntabilitas dan tanggung jawab intrinsik mereka secara terukur. Lebih lanjut, keberhasilan administrasi ini merefleksikan esensi di mana BUMDes dipandang sebagai jaringan kontrak sosial. Artinya, penciptaan nilai melalui pelaporan dan administrasi yang tertib bukan sekadar kewajiban administratif kepada pemilik modal, melainkan bentuk etika dan tanggung jawab moral kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa dan pemerintah. Secara empiris, temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyani et al. (2017) yang membuktikan bahwa ketertiban dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan fungsi perbendaharaan secara langsung meningkatkan pertanggungjawaban keuangan. Keberhasilan administrasi ini juga tidak terlepas dari kualitas perencanaan di tahap awal, sebagaimana dikonfirmasi oleh Rahmawati et al. (2024) yang menemukan bahwa fungsi perencanaan dan tata usaha yang koheren adalah fondasi utama bagi akuntabilitas BUMDes.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa implementasi administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat akuntabilitas keuangan BUMDes di Provinsi Banten. Secara spesifik, pelaksanaan penatausahaan yang tertib dan berpedoman pada standar operasional terbukti mampu menciptakan struktur pengawasan formal yang memfasilitasi transparansi tata kelola. Di sisi lain, adopsi teknologi informasi bertindak sebagai instrumen mitigasi yang sangat efektif untuk menekan asimetri informasi dan risiko manipulasi pencatatan keuangan (*fraud*). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyelewengan dana desa, ketersediaan aplikasi dan perangkat teknologi mutakhir tidak akan berjalan optimal apabila tidak didampingi oleh kepatuhan pengelola terhadap prosedur administrasi yang terstandarisasi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Pertama, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dalam model ini sebesar 26,3%, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat 73,7% variasi faktor lain di luar model penelitian ini yang turut memengaruhi akuntabilitas keuangan BUMDes. Kedua, pengumpulan data primer yang murni mengandalkan kuesioner mandiri (*self-administered questionnaire*) memiliki kerentanan terhadap bias subjektivitas responden, di mana pengelola BUMDes cenderung memberikan persepsi yang normatif atau terlalu positif mengenai kinerja institusinya sendiri.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi praktis dan saran untuk penelitian lanjutan. Bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Provinsi Banten, sangat disarankan untuk segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan yang baku dan berinvestasi pada peningkatan literasi digital pengelola melalui pelatihan software akuntansi. Langkah strategis ini diperlukan guna meminimalisasi celah lapping dan inakurasi pelaporan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas model penelitian ini dengan memasukkan variabel-variabel lain yang belum terakomodasi, seperti kompetensi sumber daya manusia, moralitas aparat desa, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Penggunaan metode campuran (*mixed-methods*) dengan menambahkan teknik wawancara mendalam juga sangat direkomendasikan untuk memvalidasi jawaban survei kuantitatif secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Akbar, A. M., Sasanti, E. erlina, Suryantara, A. bayu, & BS, R. S. T. rahayu ningsih A. doc. (2022). Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang. *Jurnal Risma*, vol.2no.4, 716–725.
- Albari, N. (2025). *Sektor Desa Jadi Sarang Utama Berkembangnya Kasus Korupsi 2024 - GoodStats*. <https://goodstats.id/article/sektor-desa-jadi-sarang-utama-berkembangnya-kasus-korupsi-2024-ZkwnR>
- Amelia, A. T., & Yanti, N. (2025). Village Financial Accountability through Siskeudes: A Case Study in Jambur Pulau. *Amkop Management Accounting Review* <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/amar/article/view/3039>
- Chen, S., Lin, S., Luo, Y., & Zhang, P. (2025). How do entrepreneurial directors shape financial reporting quality in non-profit organizations? *International Review of Economics & Finance*, 99(February), 103993. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103993>
- Gunnvald, R. (2014). *Estimating Probability of Default Using Rating Migrations in Discrete and Continuous Time*.
- Haeruddin, H., & Mariana, L. (2021). ANALISIS SISTEM AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) (Studi Kasus : BUM Desa di Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar). *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(1), 36–45. <https://doi.org/10.37476/AKMEN.V18I1.1351>
- Hamza, L. O. F., Sabir, S., & Aswan, A. (2023). Influence Of Government Accounting Information Systems, Implementation of Government Accounting Standards, Human Resource Competence, and Internal Control Systems as Moderator Variables on the Quality of Regional Government Financial Reports in the Study.... *Pancasila International Journal of Applied Social Science*, 1(02), 110–123. <https://doi.org/10.59653/PANCASILA.V1I02.199>
- Handayani, A., Anisa, A., Purwasih, D., & Rosharlianti, Z. (2025). Determinant Factors Enhancing the Financial Accountability of Village-Owned Enterprises. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(6), 773–781. <https://doi.org/10.32479/ijefi.21703>
- Handayani, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pamulang, U. (2024). Pendampingan Administrasi Perizinan Usaha Dan Akuntansi Keuangan BUMDes Bebedahan Berkah. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 6(2), 100–104. <https://doi.org/10.70825/JPTB.V6I2.2314>
- Indriyanthi, N. N. I., Nurabiah, Suhaedi, W., & Sari, L. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(4), 13–26. <https://doi.org/10.29303/RISMA.V1I4.104>
- Ishak, P., & Syam, F. (2020). *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review Pengaruh Kompetensi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES*. 1(2). <https://jtebr.unisan.ac.id>
- Kayani, U., Hoang, K., Viet, H., & Manita, R. (2025). Does chairman education matter to accounting quality? *International Review of Economics and Finance*, 104(November), 104739. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104739>
- Masjidin, U. L., & Yuliani, N. L. (2021). Determinasi Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 156–166. <https://doi.org/10.31603/bacr.6354>
- Mayasari, S. T., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Astuti, E. B. (2023). Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Bumdes Subur Makmur Lestari Di Desa Wisata Tlogoweru. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(2), 131–141.

<https://doi.org/10.28918/JAAIS.V4I2.1196>

- Mulyani, S., & Kasim, E. (2017). Financial reporting quality and public accountability in regional government: Analysis for the impact of competence, internal control and information technology; Indonesia evidence. *Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic Development, Innovation Management, and Global Growth, 2017-Janua*, 2023–2032. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048447371&partnerID=40&md5=b3f4d9def4bb1218348d8a35272ea0bd>
- Puspitasari, M., & Adi, P. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah. *Perspektif Akuntansi*, 6(2), 21–41. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p21-41>
- Rahmawati, E., Ella, S., Andari, R. N., & ... (2024). Social and Human Capital Development in Village-Owned Enterprises: Implications for Performance Enhancement. *Sodality: Jurnal Sosiologi* <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/50213>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. ... *of Accounting & Organizational* <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070>
- Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025). Strategi Anti-Fraud Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali. *Jesya*, 8(1), 593–604. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1957>